

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter (2003:292) yang menempatkan penyelenggaraan Pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga pemerintahan (Mochtar Masoed, 2003:43).

Dalam sebuah tatanan negara demokrasi partisipasi politik merupakan aspek yang penting, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan baik biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan seperti adanya modernisasi hukum, administrasi pembangunan, ideologi nasional, pembangunan sosial politik, integrasi politik, pemerataan pembangunan dan partisipasi politik. Dapatlah dikatakan bahwa dengan modernisasi telah menghasilkan partisipasi yang meluas. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi

pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sudijono Sastroatmodjo, 1995:67) .

Partisipasi politik secara universal diakui sebagai elemen inti dari demokrasi sejak zaman klasik. Dalam perkembangan demokrasi menjadikan partisipasi sebagai sesuatu yang penting dan sentral dalam kehidupan berpolitik dan pemilu. Dimensi-dimensi atau cakupan dari studi partisipasi masyarakat terus mengalami perkembangan, baik dari sisi teori maupun dari segi metodologinya, serta dari isu-isu yang dikaji. Dalam konteks akademik dan politis, isu kehadiran pemilih pada pemilu merupakan sesuatu yang penting, karena dapat menentukan tingkat legitimasi politik pada pihak yang berkuasa dan penyelenggara pemilu. Selain itu, arti penting *voter turnout* juga berkaitan dengan kepercayaan warga pada demokrasi dan masa depan politik suatu negara.

Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum (Miriam Budiardjo, 2008:367).

Di dalam bukunya yang berjudul “*No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*” yang telah diterjemahkan, Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Huntington & Nelson, 1994:6). Sementara itu Rush dan Althoff

memberi batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam aktifitas pada suatu sistem politik (Rush & Althoff, 2001:142).

Partisipasi politik, menurut Herbert McClosky yang dikutip oleh Damsar di dalam “Pengantar Sosiologi Politik” dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses Pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Damsar,2010:180). Oleh karena itu, ada semacam “rambu-rambu” partisipasi politik, antara lain; *Pertama*, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. *Kedua*, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah. *Keempat*, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah. *Kelima*, mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam Pemilu (Ramlan Surbakti,1999:15-16).

Dari beberapa definisi partisipasi politik yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat tidak tertekan pada sikap-sikap namun bersifat sukarela. Kita ketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi

masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Pemberian suara dalam kegiatan Pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi yang terbiasa, yang seringkali lebih luas dibandingkan dengan partisipasi politik lain. Kegiatan partisipasi politik meskipun kelihatannya hanyalah menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja untuk membantu Pemilihan, membantu di tempat pemungutan suara, mencari dukungan untuk calon dan tindakan-tindakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pemilihan umum merupakan partisipasi kolektif yang konvensional (Sudijono Satroatmodjo, 1995:78).

Dalam konteks pemilu, naik turunnya jumlah pemilih merupakan salah satu perhatian yang sering dianggap penting. Pertanyaannya mengapa terjadi perubahan atau naik turun? Ada kalanya jumlah pemilih naik tajam dan ada kalanya juga mengalami penurunan yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan partisipasi politik memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya.

Partisipasi politik selain berkaitan dengan sistem politik juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. meluasnya partisipasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yang oleh Verba dan Nie (1972:13) dalam Mujani (2007:272-274) mengatakan bahwa sebagian besar partisipasi ditentukan oleh status sosial ekonomi. Hal ini juga dipertegas oleh temuan

Conway (1985;19-24) pada sejumlah penelitian bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bagus umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi (Conway, 1985:19-24). Di dalam penelitiannya Frank Lindenfield sebagaimana yang dikutip Rafael Marga Maran (2007;156) menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial.

Pengaruh status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi juga terlihat dalam penelitian Yanuk Sri Mulyani (2014) yang menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kecamatan Koto Salak dan Asam Jujuhan di Kabupaten Dharmasraya adalah status sosial ekonomi. Namun beberapa penelitian lain seperti, Marlina Tarigan (2009) dan Faizil Aziz (2012) tidak menemukan hubungan positif antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik. Artinya status sosial ekonomi tidak selalu memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat partisipasi politik. Oleh karena itu dengan melihat perkembangan tingkat kesejahteraan Kabupaten Dharmasraya yang meningkatnya relatif cepat maka dalam penelitian ini juga digunakan variabel status sosial ekonomi untuk melihat hubungannya dengan tingkat partisipasi politik.

Selain itu, variabel kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. Sebagaimana, menurut Ramlan Surbakti (1999:184), dijelaskan bahwa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada

pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.

Praktek politik yang dibarengi dengan transaksi keuangan juga ditengarai terjadi di Sumbar meskipun muncul di ranah hukum untuk kasus Solok. Oleh sebab itu, mungkin benar gambaran John Markoff (2002;206) bahwa Indonesia saat ini mengalami *hybrid* demokrasi, mekanisme demokrasi berlangsung secara bersama-sama dengan praktek-praktek non demokratis. Sebagai akibatnya, rasionalitas politik yang didorong karena ada transaksi money politik ini perlu dipertanyakan.

Sebagaimana yang dikutip Sri Nuryanti (2014;155), dalam tulisannya, Larry Diamond menyebutkan bahwa partisipasi yang dilandasi oleh motif lain akan melahirkan demokrasi semu (*pseudo democracy*), dimana demokrasi yang berlangsung bukan demokrasi yang sebenarnya demokrasi. Pemilih akan menganggap wajar atas *money politics* yang terjadi, karena bisa jadi hal itu sudah menggejala secara umum di berbagai wilayah. Burhanudin Muhtadi dalam hasil survei indikator (2013) bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pemilih yang tinggal di desa lebih rentan terhadap sasaran politik uang.

Ketiga variabel di atas menjadi hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan fenomena yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Variabel status sosial ekonomi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan politik uang akan digunakan untuk melihat seberapa besar

pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Di Indonesia, keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 telah membuka kesempatan berlangsungnya proses reformasi politik . Pemerintah telah memberi ruang yang lebih terbuka kepada warga negara untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan kelahiran banyak partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan; kebebasan media; Pemilu yang bebas, kompetitif dan jujur; dan peningkatan partisipasi politik. Beberapa langkah reformasi yang diambil antara lain : (1) Perubahan UUD 1945 telah memberikan jaminan hukum bagi rakyat untuk berpartisipasi lebih luas dalam kehidupan politik; (2) Perubahan paket UU politik antara lain undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang penyelenggara Pemilu, undang-undang tentang Pemilu presiden, dan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; (3) mendorong kembali partisipasi politik rakyat melalui penyelenggaraan otonomi daerah, dan penglibatan rakyat dalam Pemilihan presiden dan Pemilihan kepala daerah secara langsung (Aidinil Zetra,dkk, 2015:1).

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah diselenggarakan secara langsung sejak tahun 2005 hingga yang paling baru diselenggarakan pada 9 desember 2015. Pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2015 yang lalu ditetapkan sebagai “Pilkada Serentak” yang diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang kepala daerahnya habis masa jabatan di 2015. Terdapat 9

provinsi dan 259 kabupaten/kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada. Salah satu peserta Pilkada serentak ini adalah Provinsi Sumatera Barat dan juga 13 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Euforia Pilkada serentak ternyata tidak memberikan pengaruh baik terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat. Hasil Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menunjukkan indikasi penurunan dari Pemilihan umum legislatif dan presiden di tahun 2014, berikut perbandingan partisipasi masyarakat pada Pemilihan umum legislatif, presiden dan Pilkada serentak :

Tabel 1.1
Persentase Perbandingan Partisipasi Masyarakat Sumatera Barat
Pada PILLEG 2014, PILPRES 2014 dan PILKADA 2015

PILLEG	PILPRES	PILKADA
68,43 %	63,74%	59,30%

Sumber : www.kpu-sumbarprov.go.id

Tabel di atas menunjukkan indikasi penurunan partisipasi pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 hanya 59,30 % pemilih yang hadir dalam pesta demokrasi tersebut. Terlihat bahwa partisipasi pada Pilkada serentak jauh lebih rendah dari dua Pemilu sebelumnya Pilleg dan Pilpres yang memiliki angka partisipasi 68,43 % dan 63,74 %.

Di Sumatera Barat, sebagaimana di daerah lain di Indonesia partisipasi politik seringkali dilandasi oleh beberapa pertimbangan misalnya kedekatan sosial kerabat, soal pemahaman politik masyarakat ataupun karena kesadaran politik yang sudah baik sehingga muncul rasionalitas-rasionalitas dalam memilih. Ada juga yang merasa bosan melakukan pemilihan karena yang terpilih misalnya,

tidak menunjukkan kinerja yang baik atau terlibat kasus, atau terlibat korupsi (Sri Nuryanti, 2014:139).

Penelitian yang dilakukan Aidinil Zetra dkk, (2010) tentang kinerja demokrasi di Sumatera Barat menyimpulkan bahwa bangunan demokrasi di daerah ternyata lemah. Demokrasi tidak memiliki landasan terpentingnya yaitu partisipasi politik meskipun demokrasi prosedural mengalami berbagai perbaikan seperti kualitas penyelenggaraan Pemilu dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya, kebebasan mendirikan partai politik, dan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi di dalam Pemilu melalui jalur non-partai juga dijamin, namun demokratisasi seperti itu ternyata tidak menjamin terwakilnya kepentingan rakyat dalam proses-proses-politik yang demokratis. Permasalahan yang sangat kentara adalah ternyata demokrasi yang tumbuh adalah demokrasi berbasis politik transaksional. *Popular democracy* yang didefinisikan secara mekanik dengan sistem suara terbanyak akan mempersubur potensi terjadinya *vote-buying* sehingga hubungan antara wakil rakyat dan konstituen yang diwakilinya bukan berlandaskan hubungan yang amanah, tetapi lebih pada hubungan jual beli suara dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, ditengah proses demokratisasi yang terus berlangsung, banyak kalangan justru mempertanyakan manfaat dari demokrasi itu sendiri bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dianggap tidak mampu menghasilkan kebijakan publik yang memihak kepada kepentingan rakyat. Demokrasi yang terbentuk adalah demokrasi elitis tanpa memperhatikan keterwakilan publik.

Fenomena ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih disetiap Pemilu. Berikut data partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 (Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Gubernur Dan Bupati/Walikota) dan PDRB Kabupaten/Kota 2014;

Tabel 1.2
Data Partisipasi Pilkada Serentak Tahun 2015 Dan
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2014

No.	Kabupaten/Kota	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati/Walikota	PDRB Perkapita Kab/Kota 2014 (Juta Rupiah)
1.	Kab. Pesisir Selatan	65.26 %	65.27 %	20.58
2.	Kab. Solok	56.64 %	56.86 %	26.43
3.	Kab. Sijunjung	59.54 %	59.90 %	29.97
4.	Kab. Tanah Datar	55.98 %	55.87 %	26.72
5.	Kab. Padang Pariaman	54.50 %	54.64 %	35.72
6.	Kab. Agam	55.55 %	55.13 %	29.95
7.	Kab. Lima Puluh Kota	61.22 %	61.27 %	29.68
8.	Kab. Pasaman	69.87 %	69.89 %	22.52
9.	Kab. Kepulauan Mentawai	64.19 %	-	35.83
10.	Kab. Dharmasraya	72.91 %	72.90 %	33.05
11.	Kab. Solok Selatan	68.89 %	68.79 %	24.79
12.	Kab. Pasaman Barat	65.12 %	65.46 %	26.79
13.	Kota Padang	52.54 %	-	46.82
14.	Kota Solok	70.52 %	70.53 %	42.05
15.	Kota Sawahlunto	53.96%	-	43.71
16.	Kota Padang Panjang	46.47 %	-	47.09
17.	Kota Bukittinggi	59.51 %	59.87	46.83
18.	Kota Payakumbuh	51.82 %	-	33.26
19.	Kota Pariaman	52.46 %	-	40.68

Sumber : KPU dan BPS Provinsi Sumbar 2015

Dari data di atas terlihat kecenderungan bahwa tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mempengaruhi tingkat partisipasi. Hal ini terlihat dari beberapa daerah yang memiliki PDRB Perkapita yang tinggi namun tingkat partisipasinya rendah seperti Kota Padang memiliki dengan PDRB Perkapita yang tinggi namun partisipasi pemilih hanya mencapai angka 52,29 %. Sedangkan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan salah satu daerah otonom baru di Sumatera Barat dengan PDRB Perkapita yang cukup rendah menempati posisi tertinggi tingkat partisipasi yaitu 72.91 %.

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh gubernur sumbar atas nama menteri dalam negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Semenjak menjadi daerah otonomi baru dari hasil pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, 2 kali Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, 2 kali Pemilihan gubernur/wakil gubernur dan yang terakhir Pilkada serentak. Disetiap Pemilihan yang terlaksana tingkat partisipasi politik masyarakat Dharmasraya tergolong tinggi. Berikut tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2005, 2010 dan 2015;

Tabel 1.3
Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2005, 2010 dan 2015
Kabupaten Dharmasraya

Tahun	Partisipasi Pemilih	
	PILGUB	PILBUB
2005	74.17 %	74.11 %
2010	72.66 %	73.57 %
2015	72.91 %	72.90 %

Sumber : www.kpu-Dharmasrayakab.go.id

Dari setiap Pilkada yang telah diselenggarakan terlihat bahwa partisipasi pemilih masyarakat Dharmasraya tergolong tinggi. Walaupun tidak dapat kita pungkiri *trend* penurunan tingkat partisipasi juga terjadi disetiap periodenya. Jika pada saat Pilkada pertama tingkat partisipasi pemilih mencapai 74 %, pada Pilkada serentak hanya mencapai 72.90%.

Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati secara langsung pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya hanya mengusung dua pasang calon yaitu pasangan Sutan Rizka Kerajaan/Amrizal Dt. Rajo Medan (SUKA AMAN) dengan perolehan dan Adi Gunawan/Jonson Putra (AG-JOS). Dalam Pilkada tesebut pasangan petahana AG-JOS berhasil dikalahkan oleh pasangan SUKA AMAN, berikut perolehan suara pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati 2015 :

Tabel 1.4
Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Serentak Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Partisipasi	Suara		
				SUKA AMAN	AG-JOS	
1.	Asam Jujuhan	4.925	3.181	64,58 %	1.975	1.105
2.	Koto Baru	19.473	14.452	74,21 %	8.667	5.399
3.	Koto Besar	16.844	11.765	69,84 %	8.814	2.696
4.	Koto Salak	11.626	8.752	75,27 %	4.523	4.031
5.	Padang Laweh	3.603	2.894	80,32 %	1.209	1.618
6.	Pulau Punjung	25.166	17.766	70,59 %	12.529	4.844
7.	Sembilan Koto	5.348	3.557	66,51 %	2.313	1.105
8.	Sitiung	17.426	13.082	75,07 %	6.625	6.132
9.	Sungai Rumbai	13.493	9.911	73,45 %	7.504	2.211
10.	Timpeh	10.027	7.659	76,38 %	4.135	3.313
11.	Tiumang	8.879	6.720	75,68 %	3.561	2.956
Total		136.810	99.739	72,90 %	61.855	35.410
Persentase (%)					69,59 %	36,41 %

Sumber : www.kpu-Dharmasrayakab.go.id

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa perolehan suara terbanyak dipegang oleh pasangan Sutan Rizka Kerajaan/Amrizal Dt. Rajo Medan (SUKA AMAN) yaitu 61.855 suara atau 69,59% yang merupakan Bupati termuda di Indonesia. sedangkan pasangan incumbent Adi Gunawan/Jonson Putra (AG-JOS) hanya memperoleh 35.410 suara atau 36,41%. Selain itu, jika melihat data partisipasi di setiap kecamatan menunjukkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki partisipasi yang rendah.

Jika dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam buku Kabupaten Dharmasraya dalam angka 2015, kondisi kesejahteraan keluarga di Kabupaten Dharmasraya yang termasuk kriteria keluarga sejahtera III mencapai 42,62 % dan keluarga sejahtera III plus 4,97 %. Lebih dari 50% masyarakat masih tergolong kriteria keluarga dibawah sejahtera III dan pra sejahtera. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah status sosial ekonomi. Frank Lendenfield dalam Rafael Maran (2007:156) menyatakan alasan rakyat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah adanya kepuasan finansial status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang-orang yang bersangkutan pun menjadi apatis.

Ramlan Surbakti juga mengatakan bahwa status sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kemudian pekerjaan adalah indikator dari status sosial yang artinya sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Gunanya untuk mempertahankan hidupnya, dengan bekerja seseorang dapat memperoleh pendapatan (uang). Lalu tingkat pendapatan, sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. perubahan pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran dan juga akan

mempengaruhi pola pengeluaran. Jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya tentu sangat bertolak karena kondisi ekonomi masyarakat yang yang dikatakan dibawa sejahtera lebih dari 50 % namun memiliki partisipasi politik yang tergolong tinggi. Fenomena ini menjadi menarik untuk dianalisis apakah faktor status sosial ekonomi yang di jelaskan oleh verba dan nie merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak Tahun 2015 ?.

Selain itu kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan juga peneliti asumsikan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Dharmasraya pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Kesadaran politik dan kepercayaan terhdap sistem pemerintahan masyarakat yang tinggi tentu memberi pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Jefry M. Paige menyatakan sebagaimana yang dikutipp surbakti (1999;143) apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif namun sebaliknya apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasinya cenderung pasif (apatis). Ramlan Surbakti (1999: 184) juga mengataka bahwa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah.

Kemenangan pasangan Sutan Riska Kerajaan dan Amrizal dengan perolehan mencapai 69,90% merupakan salah satu cara masyarakat menunjukkan kekecewaan terhadap pemerintahan terdahulu. Sebagaimana yang dilansir warta

andalas pada 15 Agustus 2015, sebanyak 48 dari 52 wali nagari mendukung pasangan Sutan Riska Kerajaan dan Amrizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 hal ini dikarenakan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan sehingga mengharapkan perubahan terhadap pembangunan di Kabupaten Dharmasraya pada pasangan dengan calon Bupati termuda di Indonesia (<http://warta-andalas.com/berita-48-dari-52-wali-nagari-menyatakan-sikap-dukung-suka---aman-.html> diakses 21 februari 2016, 22;50).

Kekecewaan masyarakat terhadap kondisi pemerintahan Dharmasraya yang tidak memihak kepentingan rakyat. Ketimpangan terhadap pembangunan daerah dan tidak adanya perubahan yang berarti dalam periode yang lalu melahirkan kekecewaan masyarakat sehingga partisipasi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu cara untuk menuju harapan baru. (<http://www.padangpos.com/2015/10/catatan-yal-aziz-sutan-riska-tuanku.html?m=1> diakses 22 februari 2016, 17:20 wib).

Politik uang bukan lagi menjadi hal baru dalam perhelatan politik. Dilihat dari teori pilihan rasional, James Coleman (2011:37-38) menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Praktek politik yang dibarengi dengan transaksi keuangan juga terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

Di dalam Pilkada serentak Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya dugaan *money politics* dilakukan oleh oknum rukun tetangga (rt) yang membagikan uang kepada masyarakat (<http://beritanda.com/index.php/suara-Pemilu/10410-sebagian-besar-daerah-di-sumbar-ditemukan-pelanggaran-Pilkada-serentak> diakses tanggal 22 Februari 2016, 16:01 wib). Realita mengenai Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonom baru yang menempati posisi tertinggi dalam partisipasi pemilihan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 menjadi hal menarik bagi peneliti untuk melihat hubungan status sosial ekonomi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak Tahun 2015.

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya ?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya ?
3. Bagaimana pengaruh politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya ?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hubungan status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk menjelaskan hubungan kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk menjelaskan hubungan politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya.

2. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan partisipasi politik masyarakat khususnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai partisipasi politik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai partisipasi politik masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi KPU dalam melihat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Dharmasraya.